

Analisis *Framing* Pemberitaan Isu Ijazah Palsu Joko Widodo pada Media Daring CNN Indonesia dan Liputan6.com

<http://dx.doi.org/10.25008/v9i1.501>

Sudarto^{1*}, Aprilianti Pratiwi¹, Muklis Efendi²

¹Universitas Pancasila

Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 - Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jln. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta 12450 - Indonesia

*E-mail Korespondensi: sudarto@univpancasila.ac.id

Submitted: June 12, 2026, **Revised:** July 2, 2026 **Accepted:** July 3, 2026

Accredited by Kemristekdikti No. 72/E/KPT/2024

Abstract

The allegation of former President Joko Widodo's fake diploma became one of the most contested political issues in Indonesia's digital public sphere throughout 2025, raising questions about how mainstream online media construct political reality on sensitive issues concerning state legitimacy. Grounded in the social construction of reality perspective and framing theory, this study aims to compare how CNN Indonesia and Liputan6.com framed the issue using Pan and Kosicki's framing analysis model, which examines news texts through four structures: syntactic, script, thematic, and rhetorical. This study employed a qualitative approach with framing-based qualitative content analysis of six news articles published between April and August 2025, three from each outlet, supported by coding and categorization using HyperResearch software. The results show that CNN Indonesia constructed an institutional-procedural frame that foregrounds forensic verification, due process of law, and the professionalism of the police, while Liputan6.com built a conclusive-affirmative frame that positions Jokowi as a victim of slander whose diploma has been legally proven authentic. Despite these different discursive strategies, both outlets converge in rejecting the fake diploma narrative and aligning their coverage with state legitimacy and political stability. The study concludes that framing differences between mainstream online media operate at the level of discursive strategy rather than ideological opposition, and it contributes to digital media literacy by revealing how routine journalistic choices shape public perception of political controversies.

Keywords: digital journalism; framing analysis; Jokowi diploma issue; online news; political communication

Abstrak

Tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi salah satu isu politik yang paling diperdebatkan di ruang publik digital Indonesia sepanjang 2025 dan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana media daring arus utama mengonstruksi realitas politik pada isu sensitif yang menyangkut

legitimasi negara. Berlandaskan perspektif konstruksi sosial atas realitas dan teori *framing*, penelitian ini bertujuan membandingkan cara CNN Indonesia dan Liputan6.com membingkai isu tersebut dengan menggunakan model analisis *framing* Pan dan Kosicki yang menelaah teks berita melalui empat struktur, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis isi kualitatif berbasis *framing* terhadap enam teks berita yang terbit pada April hingga Agustus 2025, masing-masing tiga berita dari setiap media, dibantu proses koding dan kategorisasi menggunakan perangkat lunak HyperResearch. Hasil penelitian menunjukkan CNN Indonesia membangun bingkai institusional-prosedural yang menonjolkan verifikasi forensik, proses hukum yang sah, dan profesionalisme kepolisian, sedangkan Liputan6.com membangun bingkai konklusif-afirmatif yang memosisikan Jokowi sebagai korban fitnah yang ijazahnya telah terbukti asli secara hukum. Meskipun strategi diskursifnya berbeda, kedua media sama-sama menolak narasi ijazah palsu dan menyelaraskan pemberitaan dengan legitimasi negara serta stabilitas politik. Penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan *framing* antarmedia arus utama bekerja pada level strategi wacana, bukan oposisi ideologis, dan temuan ini berkontribusi pada penguatan literasi media digital masyarakat.

Kata kunci: analisis *framing*; berita daring; isu ijazah Jokowi; jurnalisme digital; komunikasi politik

PENDAHULUAN

Perkembangan media digital telah mengubah secara mendasar cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menginterpretasikan informasi politik. Dalam konteks Indonesia, media daring kini menjadi arena utama pembentukan opini publik, terutama ketika isu yang diangkat menyangkut figur politik sentral. Kecepatan distribusi informasi, logika algoritma platform, dan persaingan trafik antarmedia membuat berita politik tidak lagi sekadar laporan peristiwa, melainkan produk konstruksi yang sarat pilihan editorial (Tapsell, 2017). Penelitian komparatif di berbagai konteks nasional memperlihatkan bahwa kepemilikan media dan tekanan ekonomi-politik secara konsisten membentuk arah pembingkai berita politik (Hallin & Mancini, 2004; Waisbord, 2022). Pada saat yang sama, ekosistem digital juga membuka ruang bagi peredaran disinformasi dan tuduhan tanpa verifikasi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara (Tandoc, Lim, & Ling, 2018; Lim, 2017).

Salah satu isu yang menjadi perbincangan luas di ruang publik digital Indonesia sepanjang 2025 adalah tuduhan mengenai ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Isu yang mulanya beredar di media sosial ini berkembang menjadi perkara hukum ketika sejumlah pihak melayangkan laporan ke kepolisian dan Jokowi sendiri melaporkan balik para penuduh atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Rangkaian peristiwa hukum yang menyertainya, mulai dari pemeriksaan Jokowi di Polresta Solo, penyitaan ijazah SMA dan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk kepentingan uji laboratorium forensik, hingga penghentian kasus setelah Polri memastikan keaslian ijazah, diberitakan secara intensif oleh media daring nasional. Isu ini tidak hanya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi medan wacana bagi media dalam menampilkan posisi, kepentingan, dan strategi pemberitaan masing-masing.

Media memiliki kekuatan untuk membingkai realitas sosial melalui pemilihan sudut pandang, diksi, narasumber, dan alur naratif tertentu. Dalam kajian komunikasi massa, praktik tersebut dikenal sebagai *framing*, yaitu proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas sehingga memengaruhi cara publik mendefinisikan masalah, menafsirkan penyebab, memberikan penilaian moral, dan membayangkan solusinya (Entman, 1993). Bingkai yang dipilih media tidak pernah netral sepenuhnya karena lahir dari rutinitas redaksional, orientasi pasar, dan relasi media dengan kekuasaan (Vliegenthart & van Zoonen, 2011). Karena itu, menelusuri cara media daring Indonesia mengonstruksi wacana seputar tuduhan ijazah palsu Jokowi menjadi penting, sebab isu ini berimplikasi langsung pada legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dua media daring arus utama, yaitu CNN Indonesia dan Liputan6.com. Keduanya dipilih karena memiliki jangkauan pembaca yang luas, kredibilitas redaksional yang relatif mapan, tetapi mewakili gaya pemberitaan yang berbeda. CNN Indonesia dikenal dengan pendekatan jurnalistik yang formal dan berorientasi pada prosedur hukum, sedangkan Liputan6.com kerap menampilkan narasi yang lebih afirmatif dan komunikatif terhadap aktor pemerintahan. Dengan menganalisis cara kedua media membingkai isu yang sama dalam periode yang

sama, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana konstruksi realitas politik terbentuk dalam pemberitaan digital.

Kajian *framing* terhadap pemberitaan isu ijazah palsu Jokowi di media daring telah mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun dengan beragam batasan yang menyisakan ruang untuk penelitian lebih lanjut. Secara internasional, studi *framing* terhadap pemberitaan isu legitimasi kepala negara di media digital telah menunjukkan pola serupa: media arus utama cenderung membangun bingkai pro-institusional yang memperkuat otoritas negara (Aalberg et al., 2017).

Kim dan Geidner (2021) dalam kajian mereka terhadap *framing* berita politik di platform digital Asia Timur juga menemukan bahwa tekanan kepemilikan dan kedekatan media dengan pemerintah secara konsisten membentuk cara media mendefinisikan dan menyajikan krisis legitimasi. Sementara itu, Hameleers dan Schmuck (2017) memperlihatkan bahwa efek *framing* berita pada persepsi legitimasi pemimpin politik bersifat nyata dan bekerja secara berbeda tergantung pada gaya narasi yang digunakan.

Muzemmil (2025) menganalisis *framing* Detik.com menggunakan model Entman dan menemukan bingkai “legitimasi prosedural” yang menonjolkan proses hukum dan otoritas institusional seraya menyampingkan klaim penuduh. Saputra (2025) membandingkan Tribunnews.com dan Detik.com melalui model Entman dan menemukan perbedaan arah bingkai: Tribunnews.com menekankan dimensi moral-politik dengan diksi “fitnah” dan “pembunuhan karakter,” sementara Detik.com lebih berorientasi legal-prosedural.

Subarkah dan Arviani (2026) mengkaji CNN Indonesia dan Republika dengan model Entman pada periode April–Mei 2025, menemukan CNN Indonesia cenderung prosedural-verifikatif sedangkan Republika menonjolkan konflik aktor dan dimensi moral-politis. Izzah dan Fardilla (2025) menerapkan model Pan dan Kosicki terhadap Tempo.co, Metrotvnews, dan Kompas.com, dan mengidentifikasi tiga kecenderungan *framing*, yakni dekonstruksi tuduhan, pengalihan isu ke ranah institusional, serta polarisasi konflik secara emosional.

Aimee dan Rosabella (2026) membandingkan Kompas.com, Tempo.co, dan Suara.com dengan model Entman dan menemukan pola *framing* yang berbeda: Kompas.com berfokus pada konflik hukum dan dinamika politik, Suara.com pada dimensi moral dan respons publik, serta Tempo.co pada prosedur hukum formal dan verifikasi data. Di luar analisis produksi teks, Sofiansyah (2025) menelaah sisi resepsi khalayak terhadap pemberitaan CNN Indonesia di YouTube melalui teori *encoding/decoding* Hall, menemukan bahwa interpretasi publik sangat dipengaruhi latar belakang ideologi dan literasi media. Sementara itu, Nur dkk. (2025) mengkaji aspek semantik-pragmatis dan menemukan penggunaan eufemisme, *litotes*, dan metafora sebagai alat pembentukan persepsi publik dalam pemberitaan digital isu ijazah Jokowi.

Meskipun penelitian-penelitian di atas telah memberikan kontribusi penting, terdapat beberapa kesenjangan yang belum terjawab. *Pertama*, sebagian besar studi menggunakan model *framing* Entman yang bertumpu pada empat elemen analitik, sehingga penelusuran mekanisme tekstual yang lebih rinci pada level sintaksis, skrip, tematik, dan retorik sebagaimana ditawarkan model Pan dan Kosicki masih terbatas, khususnya untuk perbandingan antarmedia. Izzah dan Fardilla (2025) memang menerapkan model Pan dan Kosicki, tetapi berfokus pada tiga media berbeda (Tempo.co, Metrotvnews, Kompas.com) dan belum mencakup CNN Indonesia maupun Liputan6.com.

Kedua, hampir seluruh kajian membatasi korpusnya pada satu atau dua bulan pemberitaan (April–Mei 2025), sehingga dinamika pembingkai sepanjang fase perkembangan kasus, dari tuduhan awal hingga penghentian perkara, belum dipotret secara utuh. *Ketiga*, penelitian tentang sisi produksi teks belum dihubungkan secara sistematis dengan implikasi wacana bagi stabilitas legitimasi negara dan literasi media digital. *Keempat*, khususnya bagi pasangan CNN Indonesia dan Liputan6.com, perbandingan *framing* berbasis model Pan dan Kosicki dengan cakupan periode April–Agustus 2025 belum pernah dilakukan.

Subarkah dan Arviani (2026) memang mengkaji CNN Indonesia, namun berpasangan dengan Republika dan menggunakan model Entman. Novelty penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) penggunaan model Pan dan Kosicki, yang lebih operasional untuk membedah mekanisme tekstual berita, dalam membandingkan CNN Indonesia dan Liputan6.com secara khusus; (2) cakupan periode yang lebih panjang (April–Agustus 2025) sehingga dapat merekam evolusi *framing* dari fase tuduhan

hingga penghentian kasus; dan (3) analisis implikasi konvergensi bingkai antarmedia arus utama terhadap konstruksi legitimasi negara dan pengembangan literasi media digital.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan membandingkan konstruksi *framing* CNN Indonesia dan Liputan6.com atas isu ijazah palsu Jokowi berdasarkan empat struktur model Pan dan Kosicki, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik, serta menjelaskan implikasi pembingkaiannya terhadap pembentukan persepsi publik dan literasi media digital.

KERANGKA TEORI

Konstruksi Sosial atas Realitas dalam Pemberitaan

Penelitian ini berpijak pada perspektif konstruksi sosial atas realitas yang memandang bahwa realitas tidak hadir secara objektif begitu saja, melainkan dibangun melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam interaksi sosial (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks media, berita merupakan hasil konstruksi: wartawan dan redaksi memilih peristiwa, menentukan sudut pandang, memilih narasumber, dan merangkai fakta menjadi narasi yang koheren. Hamad (2004) menegaskan bahwa pemberitaan politik di media massa Indonesia pada dasarnya adalah konstruksi realitas politik yang dibentuk oleh faktor internal redaksi maupun faktor eksternal seperti relasi ekonomi-politik media. Dengan demikian, dua media yang meliput peristiwa yang sama sangat mungkin menghasilkan realitas simbolik yang berbeda.

Teori Framing

Framing merupakan kelanjutan logis dari perspektif konstruksionis. Entman (1993) mendefinisikan *framing* sebagai proses menyeleksi aspek tertentu dari realitas yang dipersepsi dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, sedemikian rupa sehingga mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian tertentu. De Vreese (2005) membedakan *framing* sebagai proses produksi (*frame building*) dan sebagai efek pada khalayak (*frame setting*), sementara Scheufele dan Tewksbury (2007) menempatkan *framing* sebagai model efek media yang bekerja pada level penafsiran, berbeda dari agenda *setting* yang bekerja pada level penonjolan isu.

Riset mutakhir menunjukkan bahwa efek *framing* berita terhadap kognisi dan sikap publik bersifat nyata meskipun dimoderasi oleh predisposisi khalayak (Lecheler & de Vreese, 2019). Dalam ekosistem digital, kekuatan bingkai media arus utama bahkan dapat diperkuat oleh sirkulasi ulang di media sosial dan logika algoritmik platform (Lim, 2017).

Model Analisis Framing Pan dan Kosicki

Untuk membedah bingkai pada level teks, penelitian ini menggunakan model analisis *framing* Pan dan Kosicki (1993) yang memandang berita sebagai wacana yang tersusun atas perangkat simbolik yang dapat diamati secara empiris. Model ini menelaah teks berita melalui empat struktur. *Pertama*, struktur sintaksis, yakni cara wartawan menyusun fakta dalam pola piramida terbalik yang tampak pada judul, lead, latar informasi, kutipan, dan sumber.

Kedua, struktur skrip, yakni cara wartawan mengisahkan peristiwa dalam kelengkapan unsur 5W+1H dan alur naratifnya. *Ketiga*, struktur tematik, yakni cara wartawan menuliskan fakta ke dalam proposisi, kalimat, dan hubungan antarkalimat yang membentuk tema tertentu. *Keempat*, struktur retorik, yakni cara wartawan menekankan makna melalui pilihan kata, idiom, metafora, dan unsur visual (Pan & Kosicki, 1993; Eriyanto, 2012; Sobur, 2015).

Keempat struktur tersebut digunakan sebagai kategori analisis utama dalam penelitian ini karena memungkinkan perbandingan yang sistematis antara dua media pada teks berita yang setara.

Jurnalisme Digital dan Pemberitaan Politik di Indonesia

Konteks industri media turut menentukan arah pembingkaiannya. Tapsell (2017) menunjukkan bahwa lanskap media Indonesia diwarnai konsentrasi kepemilikan oleh konglomerasi yang memiliki kepentingan politik-ekonomi, sehingga pemberitaan politik kerap diselaraskan dengan posisi pemilikannya. Pada saat yang sama, jurnalisme daring beroperasi dalam tekanan kecepatan dan ekonomi klik yang mendorong penyederhanaan isu dan ketergantungan pada sumber resmi (Tandoc dkk., 2018).

Dalam isu yang bersinggungan dengan disinformasi, media arus utama dapat memainkan peran ganda: sebagai pem-verifikasi yang meluruskan hoaks sekaligus sebagai aktor yang turut membentuk arah opini melalui bingkai yang dipilihnya. Kerangka inilah yang menjadi dasar untuk membaca perbedaan strategi pembingkai CNN Indonesia dan Liputan6.com atas isu ijazah palsu Jokowi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan jenis analisis isi kualitatif berbasis *framing*. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengidentifikasi pola konstruksi makna dalam teks berita, bukan mengukur frekuensi pesan secara statistik. Objek penelitian adalah teks berita mengenai isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia (cnnindonesia.com) dan Liputan6.com pada periode April hingga Agustus 2025, yaitu rentang waktu ketika isu tersebut bergulir dari tuduhan publik, proses penyidikan, hingga penghentian perkara. Kedua media dipilih secara purposif berdasarkan popularitas, kredibilitas, dan kecenderungan redaksionalnya dalam pemberitaan politik nasional.

Unit analisis berupa enam teks berita yang dipilih secara purposif, terdiri atas tiga berita dari CNN Indonesia dan tiga berita dari Liputan6.com, yang masing-masing mewakili fase penting perkembangan kasus. Data primer diperoleh melalui dokumentasi digital terhadap teks berita dari situs web resmi kedua media, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka mengenai teori *framing* dan jurnalisme digital.

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu: (1) dokumentasi digital teks berita dari masing-masing media; (2) koding dan kategorisasi isi berita menggunakan perangkat lunak *HyperResearch* untuk mengidentifikasi tema, pola narasi, serta kemunculan elemen *framing* seperti judul, *lead*, kutipan, narasumber, latar informasi, dan penutup; dan (3) klasifikasi terhadap empat struktur framing model Pan dan Kosicki, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui empat tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan menyeleksi bagian berita yang relevan dengan fokus penelitian; (2) kategorisasi *framing* dengan mengidentifikasi perangkat *framing* Pan dan Kosicki pada setiap teks berita; (3) interpretasi terhadap makna ideologis dan arah pembingkai media; serta (4) perbandingan hasil *framing* CNN Indonesia dan Liputan6.com untuk menemukan perbedaan dan kecenderungan dalam konstruksi wacana.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori, yaitu dengan membandingkan hasil analisis teks dari kedua media serta meninjau kesesuaiannya dengan teori *framing* dan literatur jurnalisme politik digital. Penggunaan *HyperResearch* juga berfungsi sebagai alat pemeriksaan silang terhadap konsistensi koding data.

HASIL PENELITIAN

Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dipilih sebagai tema analisis karena menyangkut kredibilitas seorang kepala negara sekaligus memperlihatkan bagaimana media digital membentuk opini publik melalui pemberitaan politik. Isu ini menjadi fenomena menarik di ruang publik digital karena menyebar cepat dan memicu beragam reaksi di berbagai kalangan masyarakat. Dalam konteks analisis konten media digital, topik ini penting karena memperlihatkan cara media menggunakan strategi *framing*, pemilihan narasumber, dan diksi untuk membangun narasi tertentu, serta bagaimana informasi dan disinformasi saling berinteraksi dalam ekosistem komunikasi digital yang sangat dinamis. Keenam berita yang dianalisis disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Berita yang Dianalisis dari CNN Indonesia dan Liputan6.com

No	CNN Indonesia	Liputan6.com
1	“Polisi Bakal Uji Forensik Ijazah SMA dan UGM Milik Jokowi” (24 Juli 2025)	“Upaya Hukum Jokowi di Kasus Ijazah Palsu” (15 April 2025)

2	“Jokowi Diperiksa Soal Kasus Ijazah di Solo Hari Ini” (23 Juli 2025)	“Polri Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Kasus Tudingan Palsu Dihentikan” (22 Mei 2025)
3	“Poin-poin Pemeriksaan Jokowi di Solo: Ijazah Kuliah UGM Disita Polisi” (24 Juli 2025)	“Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Masih Berlanjut, Polisi Kembali Panggil Roy Suryo Cs” (19 Agustus 2025)

Sumber: Dokumentasi peneliti dari cnnindonesia.com dan liputan6.com (2025)

Pembingkaian oleh CNN Indonesia

Berita pertama, “Polisi Bakal Uji Forensik Ijazah SMA dan UGM Milik Jokowi” (24 Juli 2025), menampilkan pemingkaian yang berfokus pada proses hukum dan verifikasi ilmiah, bukan pada substansi tuduhan pemalsuan itu sendiri. Secara sintaksis, CNN Indonesia menempatkan kepolisian sebagai aktor utama pemberitaan; judul dan *lead* menonjolkan tindakan uji forensik sebagai langkah profesional dan objektif untuk memastikan keaslian dokumen. Seluruh kutipan bersumber dari pejabat resmi, yakni Kabid Humas Polda Metro Jaya, tanpa ruang bagi pihak penuduh maupun oposisi.

Secara skrip, berita disusun kronologis dan sistematis, dari kronologi pemeriksaan hingga penjelasan teknis uji forensik. Tema besar yang muncul adalah legitimasi negara dan profesionalitas lembaga hukum, sementara secara retorik diksi seperti *uji forensik*, *pembuktian ilmiah*, dan *prosedur hukum* memperkuat kesan objektivitas dan menjauhkan berita dari nada emosional atau politis.

Berita kedua, “Jokowi Diperiksa Soal Kasus Ijazah di Solo Hari Ini” (23 Juli 2025), membingkai isu melalui sudut pandang hukum yang serupa. Fokus pemberitaan bukan pada tuduhan yang beredar, melainkan pada jalannya pemeriksaan Jokowi sebagai pelapor dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. *Framing* yang dibangun menampilkan citra profesionalitas dan netralitas aparat negara: polisi digambarkan bekerja berdasarkan prosedur, sementara Jokowi ditampilkan sebagai pihak yang kooperatif dan menghormati proses hukum. Tidak ada ruang bagi suara pihak penuduh, sehingga narasi terfokus pada kinerja institusi hukum. Pilihan bahasa yang teknokratik dan objektif memperkuat kesan netral serta menghindari unsur sensasional, dan menghasilkan efek makna bahwa kasus ini merupakan persoalan hukum yang sedang ditangani secara sah oleh lembaga negara.

Berita ketiga, “Poin-poin Pemeriksaan Jokowi di Solo: Ijazah Kuliah UGM Disita Polisi” (24 Juli 2025), menekankan proses penyidikan secara faktual. Fokus utama berita adalah langkah konkret aparat dalam menyita dokumen sebagai bagian dari pembuktian hukum. Struktur pemberitaan disusun dengan pola kronologis: tahapan pemeriksaan, daftar 45 pertanyaan penyidik, dokumen yang disita, dan penjelasan kepolisian. Secara tematik berita ini mengangkat isu penegakan hukum dan transparansi investigasi, sedangkan secara retorik diksi seperti *disita*, *dijadikan barang bukti*, dan *prosedural* memberi kesan formal, administratif, dan profesional. Melalui gaya dan struktur semacam ini, CNN Indonesia membentuk persepsi bahwa kasus ijazah Jokowi ditangani serius dalam koridor hukum yang sah tanpa menggiring opini terhadap pihak mana pun.

Pembingkaian oleh Liputan6.com

Berita pertama, “Upaya Hukum Jokowi di Kasus Ijazah Palsu” (15 April 2025), dibingkai dengan menonjolkan sisi defensif dan legalistik Jokowi dalam menghadapi tuduhan. Fokus pemberitaan bukan pada substansi tuduhan, melainkan pada langkah hukum yang ditempuh untuk menjaga nama baik melalui jalur resmi. Secara sintaksis, narasumber didominasi kuasa hukum dan pernyataan resmi, tanpa ruang bagi narasi penuduh. Secara skrip, alur disusun dari konteks munculnya tuduhan, reaksi pihak Jokowi, hingga langkah hukum kuasa hukumnya. Tema utamanya adalah presiden yang menempuh jalur konstitusional untuk mempertahankan kehormatan, dan secara retorik diksi seperti *upaya hukum*, *fitnah*, dan *klarifikasi resmi* membentuk citra Jokowi sebagai korban tuduhan tidak berdasar yang tetap tenang, taat hukum, dan bermartabat. Visual berita yang menampilkan Jokowi berekspresi tenang dalam suasana kenegaraan turut menegaskan citra tersebut.

Berita kedua, “Polri Pastikan Ijazah Jokowi Asli, Kasus Tudingan Palsu Dihentikan” (22 Mei 2025), dibingkai dengan nada konklusif, afirmatif, dan legitimatif. Melalui judul yang lugas, Liputan6.com langsung menutup ruang spekulasi dengan menyatakan hasil pemeriksaan membuktikan

keaslian ijazah. Fokus pemberitaan bukan lagi pada proses penyidikan, melainkan pada hasil akhir. Struktur berita disusun ringkas namun sistematis: pemaparan hasil penyelidikan, keterangan resmi Polri dan pihak kampus, lalu pernyataan penghentian kasus, sehingga berita berfungsi sebagai pernyataan final yang menutup polemik dengan otoritas lembaga hukum dan pendidikan tinggi. Secara retorik, diksi yang penuh kepastian seperti *pastikan*, *asli*, dan *dihentikan* menciptakan kesan final dan menutup ambiguitas, memulihkan citra Jokowi sekaligus mengukuhkan kredibilitas lembaga negara.

Berita ketiga, “Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Masih Berlanjut, Polisi Kembali Panggil Roy Suryo Cs” (19 Agustus 2025), dibingkai dengan fokus pada tindakan hukum terhadap pihak penuduh, bukan terhadap Jokowi sebagai subjek tuduhan. Liputan6.com menempatkan pemberitaan dalam kerangka penegakan hukum dengan menyoroti pemanggilan kembali pihak-pihak yang menyebabkan isu.

Secara struktural, berita disusun kronologis dari perkembangan terbaru kasus, daftar pihak yang dipanggil ulang, hingga keterangan resmi kepolisian, tanpa menampilkan sudut pandang penuduh. Tema utamanya adalah penegakan hukum terhadap penyebar hoaks dan perlindungan presiden sebagai simbol negara. Diksi seperti *penyebar tuduhan*, *proses hukum*, dan *pemanggilan lanjutan* mencerminkan gaya bahasa tegas dan legalistik. *Framing* ini secara efektif menggeser fokus publik dari pembuktian dokumen ke penindakan hukum atas penyebar tuduhan.

Perbandingan Framing CNN Indonesia dan Liputan6.com

Hasil identifikasi keempat struktur *framing* model Pan dan Kosicki pada keenam berita dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Analisis *Framing* Model Pan dan Kosicki pada CNN Indonesia dan Liputan6.com

No	Aspek Framing	CNN Indonesia	Liputan6.com
1	Struktur sintaksis	Judul dan lead fokus pada tindakan polisi (uji forensik, penyitaan dokumen); narasumber didominasi pihak resmi (Polri, penyidik); tidak memberi ruang pada pihak penuduh.	Judul dan lead menonjolkan upaya hukum Jokowi serta kepastian keaslian ijazah; narasumber dari kuasa hukum, Istana, dan Polri; menonjolkan pembelaan terhadap presiden.
2	Struktur skrip	Urutan berita: konteks pemeriksaan, proses forensik, penjelasan polisi; menekankan objektivitas dan tahapan hukum yang sedang berjalan.	Urutan berita: tuduhan, klarifikasi Jokowi, hasil investigasi, penutupan kasus; menonjolkan akhir polemik dan pembuktian kebenaran.
3	Struktur tematik	Tema utama penegakan hukum dan verifikasi ilmiah; fokus pada proses hukum, bukan tuduhan; pemerintah dan lembaga hukum digambarkan bekerja profesional.	Tema utama presiden sebagai korban tuduhan palsu; fokus pada legitimasi Jokowi dan hasil pemeriksaan; tuduhan dinyatakan tidak berdasar.
4	Struktur retorik	Diksi netral: uji forensik, pemeriksaan, barang bukti; nada informatif dan teknokratik; visual formal dan netral.	Diksi persuasif: fitnah, upaya hukum, ijazah asli, kasus dihentikan; nada membela dan konklusif; visual Jokowi atau simbol negara untuk memperkuat kredibilitas.
5	Arah <i>framing</i> umum	Menampilkan netralitas dan profesionalisme lembaga hukum dalam menangani isu.	Menampilkan pembelaan terhadap Jokowi dan penegasan bahwa kasus sudah selesai.

6	Efek makna bagi publik	Membentuk persepsi bahwa isu ijazah palsu ditangani secara sah dan objektif.	Membentuk persepsi bahwa tuduhan tersebut hanyalah fitnah dan sudah terbukti tidak benar.
---	------------------------	--	---

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025)

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa CNN Indonesia menggunakan *framing* yang bersifat institusional dan prosedural dengan menyoroti proses hukum sebagai bukti objektivitas, sedangkan Liputan6.com menggunakan *framing* yang konklusif dan afirmatif dengan menyoroti hasil akhir bahwa Jokowi terbukti benar dan menjadi korban tuduhan palsu. Perbedaan tersebut dapat diuraikan lebih rinci pada setiap struktur framing berikut.

Pembahasan

Pada struktur sintaksis, CNN Indonesia menyusun berita dengan pola objektif dan informatif. Judul dan *lead* berfokus pada tindakan polisi seperti uji forensik, penyitaan dokumen, dan proses pemeriksaan di Solo. Sumber berita didominasi pihak resmi tanpa memberi ruang pada narasumber dari pihak penuduh, yang menunjukkan keinginan CNN menampilkan peristiwa sebagai proses hukum yang sah dan netral. Sebaliknya, Liputan6.com lebih menonjolkan sisi reaktif dan afirmatif dari pihak Jokowi.

Judul seperti “Upaya Hukum Jokowi di Kasus Ijazah Palsu” dan “Polri Pastikan Ijazah Jokowi Asli” mengarahkan pembaca pada pembelaan terhadap presiden, dengan sumber berita dari kuasa hukum, pejabat Istana, dan pernyataan resmi Polri yang mendukung klarifikasi Jokowi. Pola dominasi sumber resmi pada kedua media ini sejalan dengan temuan Pan dan Kosicki (1993) bahwa pilihan sumber merupakan perangkat sintaksis utama yang menghadirkan klaim otoritas dan objektivitas dalam berita.

Pada struktur skrip, CNN Indonesia mengedepankan alur kronologis dan prosedural, dari kronologi pemeriksaan, langkah teknis uji forensik, hingga penjelasan proses penyidikan, sehingga menonjolkan prinsip *due process of law*. Sementara itu, Liputan6.com menyusun alur yang berorientasi hasil: berita dibuka dengan tuduhan atau polemik, diarahkan pada klarifikasi Jokowi, dan ditutup dengan hasil pemeriksaan yang membuktikan keaslian ijazah. Alur naratif demikian berfungsi menegaskan bahwa isu telah selesai dan tidak berdasar, dengan Jokowi sebagai pihak yang memenangkan kebenaran.

Pada struktur tematik, CNN Indonesia membangun tema utama penegakan hukum dan verifikasi ilmiah. Narasi berfokus pada objektivitas penyidikan, profesionalitas polisi, dan pembuktian melalui metode ilmiah tanpa kesimpulan yang menyudutkan ataupun membela, sehingga menunjukkan kecenderungan *framing* yang netral dan institusional. Liputan6.com mengangkat tema besar legitimasi Jokowi dan penghentian hoaks; isi berita menekankan bahwa tuduhan adalah fitnah dan Polri telah memastikan ijazah presiden asli, sehingga *framing*-nya bersifat konklusif dan defensif.

Mengacu pada Entman (1993), kedua media sesungguhnya sama-sama mendefinisikan masalah bukan sebagai dugaan pemalsuan ijazah, melainkan sebagai persoalan penyebaran tuduhan: CNN Indonesia menonjolkan dimensi penyelesaian (uji forensik dan proses hukum), sedangkan Liputan6.com menonjolkan dimensi penilaian moral (tuduhan sebagai fitnah terhadap kepala negara).

Pada struktur retorik, CNN Indonesia menggunakan gaya bahasa teknokratik, objektif, dan minim muatan emosi, dengan visual yang netral seperti proses hukum formal. Liputan6.com menggunakan diksi yang lebih persuasif dan afirmatif, seperti *fitnah*, *ijazah asli*, dan *kasus dihentikan*, dengan visual Jokowi berekspresi tenang atau simbol kenegaraan yang memperkuat citra pemimpin yang terzalimi namun bermartabat. Perangkat retorik semacam ini, sebagaimana dijelaskan Sobur (2015), bekerja menanamkan kesan dan menekankan sisi tertentu dari realitas sehingga penafsiran pembaca terarah pada bingkai yang dikehendaki media.

Dari keseluruhan struktur *framing*, CNN Indonesia lebih menonjolkan dimensi proses dan objektivitas, sedangkan Liputan6.com menonjolkan hasil dan pembelaan terhadap presiden. Efek makna yang berpotensi muncul di publik pun berbeda: pembaca CNN Indonesia diarahkan untuk percaya bahwa negara dan aparat hukum bekerja profesional dan ilmiah, sedangkan pembaca

Liputan6.com diarahkan untuk percaya bahwa Jokowi adalah korban fitnah dan kasus telah tuntas secara hukum. Sesuai kerangka frame setting (de Vreese, 2005; Lecheler & de Vreese, 2019), perbedaan penekanan ini dapat menghasilkan skema interpretasi yang berbeda meskipun kedua media memberitakan rangkaian fakta yang sama.

Jika diposisikan di antara penelitian-penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memperlihatkan sejumlah persamaan sekaligus perbedaan yang signifikan. *Pertama*, *framing* institusional-prosedural CNN Indonesia yang ditemukan penelitian ini selaras dengan *framing* “legitimasi prosedural” Detik.com yang diidentifikasi Muzemmil (2025) serta orientasi legal-prosedural Detik.com dalam kajian Saputra (2025). Keselarasan ini mengindikasikan bahwa bingkai prosedural-institusional bukan hanya khas CNN Indonesia, melainkan merupakan pola yang lebih luas pada media daring arus utama Indonesia dalam menghadapi isu sensitif yang menyangkut kepala negara.

Kedua, temuan mengenai CNN Indonesia yang prosedural-verifikatif sejalan dengan hasil Subarkah dan Arviani (2026), yang mengkaji CNN Indonesia pada periode lebih awal (April–Mei 2025) dengan model Entman. Hal ini memperkuat konsistensi editorial CNN Indonesia sepanjang bergulirnya kasus, sekaligus mengafirmasi bahwa model Pan dan Kosicki dan model Entman menghasilkan deskripsi yang kompatibel, meskipun dengan kedalaman analisis tekstual yang berbeda.

Ketiga, bingkai konklusif-afirmatif Liputan6.com yang menonjolkan diksi “fitnah” dan pembelaan terhadap presiden dapat dikomparasikan dengan orientasi moral-politik Tribunnews.com dalam kajian Saputra (2025) dan orientasi moral Suara.com dalam kajian Aimee dan Rosabella (2026). Meskipun demikian, terdapat perbedaan penting: Liputan6.com membingkai pembelaan dalam kerangka legalitas dan kepastian hukum (“ijazah asli,” “kasus dihentikan”), sedangkan Tribunnews.com lebih mengarah pada mobilisasi kecaman moral dan emosional. Ini menunjukkan bahwa bingkai afirmatif-pro-pemerintah pun memiliki gradasi strategis antarmedia.

Keempat, berbeda dari kajian Izzah dan Fardilla (2025) yang menggunakan model Pan dan Kosicki pada Tempo.co, Metrotvnews, dan Kompas.com dan menemukan tiga kecenderungan *framing* yang relatif beragam (dekonstruksi tuduhan, pengalihan isu ke ranah institusional, polarisasi konflik), penelitian ini menemukan kesamaan arah fundamental antara CNN Indonesia dan Liputan6.com meskipun dengan strategi wacana yang berbeda. Ini mengisyaratkan bahwa pilihan pasangan media yang dianalisis turut memengaruhi simpulan tentang keberagaman atau keseragaman *framing*.

Kelima, penelitian Sofiansyah (2025) yang menemukan bahwa interpretasi audiens terhadap pemberitaan CNN Indonesia di YouTube sangat dipengaruhi latar belakang ideologi dan literasi media menjadi pelengkap penting bagi temuan penelitian ini: bingkai prosedural CNN Indonesia yang tampak netral tidak serta-merta diterima secara seragam oleh publik, melainkan dinegosiasikan atau bahkan ditolak tergantung pada posisi ideologis pembacanya. Temuan ini sekaligus menegaskan relevansi penguatan literasi media digital sebagai implikasi praktis dari penelitian ini.

Keenam, kajian Nur dkk. (2025) tentang eufemisme dan strategi semantik-pragmatis dalam pemberitaan isu ijazah Jokowi memperlengkapi analisis retorik dalam penelitian ini: selain perangkat *framing* makro seperti pilihan narasumber dan tema, perangkat mikrolinguistik seperti eufemisme, litotes, dan metafora turut bekerja secara halus untuk membentuk persepsi publik, dan ini berlaku pula pada diksi-diksi yang digunakan CNN Indonesia maupun Liputan6.com.

Temuan penting penelitian ini adalah bahwa di balik perbedaan strategi wacana tersebut terdapat konvergensi arah pembingkai: kedua media sama-sama menolak narasi ijazah palsu dan tidak memberikan ruang yang berarti bagi suara pihak penuduh. Hal ini memperkuat argumen Hamad (2004) dan Tapsell (2017) bahwa media arus utama Indonesia cenderung menyelaraskan pemberitaan politik dengan kepentingan stabilitas dan legitimasi negara.

Pertanyaan yang perlu dijawab lebih lanjut adalah: mengapa CNN Indonesia dan Liputan6.com, meskipun berkonvergensi dalam menolak narasi ijazah palsu, memilih strategi *framing* yang berbeda? Setidaknya terdapat tiga faktor penjelas. *Pertama*, perbedaan identitas editorial dan target audiens. CNN Indonesia, yang berafiliasi dengan merek jurnalisme internasional CNN, cenderung membangun citra profesionalisme melalui bahasa teknokratik dan pendekatan prosedural untuk mempertahankan kepercayaan segmen audiens perkotaan yang melek media. Liputan6.com, yang beroperasi di bawah MNC Group dengan basis pembaca yang lebih luas dan beragam, menggunakan gaya afirmatif yang lebih komunikatif dan empatik terhadap figur pemimpin negara untuk menjangkau audiens yang lebih emosional dalam merespons isu politik (Tapsell, 2017; Waisbord, 2022).

Kedua, perbedaan fase pemberitaan yang dianalisis turut menentukan strategi bingkai. CNN Indonesia lebih banyak meliput fase proses penyidikan (Juli 2025), sehingga framing prosedural menjadi logis secara jurnalistik. Liputan6.com mencakup rentang waktu lebih panjang, dari awal polemik (April 2025) hingga fase penindakan hukum terhadap penuduh (Agustus 2025), sehingga memungkinkan framing yang lebih konklusif dan defensif.

Ketiga, dinamika persaingan trafik di ekosistem digital mendorong setiap media untuk memilih angle yang paling menarik bagi segmen pembacanya, sehingga meskipun nilai editorial yang besar sama-sama pro-legitimasi negara, strategi naratif yang dipilih berbeda untuk memaksimalkan relevansi dan keterlibatan audiens masing-masing (Kim & Geidner, 2021; Aalberg et al., 2017). Berbeda dari penelitian *framing* sebelumnya yang umumnya menemukan polarisasi bingkai antarmedia pada isu elektoral, penelitian ini menunjukkan bahwa pada isu delegitimasi personal kepala negara yang bersumber dari disinformasi, perbedaan antarmedia arus utama bekerja pada level strategi diskursif, bukan pada level keberpihakan ideologis yang berlawanan.

Dalam ekosistem digital tempat disinformasi mudah bersirkulasi (Tandoc dkk., 2018; Lim, 2017), posisi beragam media arus utama semacam ini berperan meredam hoaks, tetapi pada saat yang sama meminimalkan ruang deliberasi karena suara pihak yang berseberangan nyaris tidak terwakili. Implikasinya bagi literasi media, publik perlu memahami bahwa berita yang tampak netral sekalipun dibangun di atas pilihan-pilihan pembingkai tertentu, sehingga sikap kritis dalam memilah fakta, opini, dan kepentingan di balik pemberitaan menjadi keniscayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis *framing* model Pan dan Kosicki terhadap enam berita yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa CNN Indonesia dan Liputan6.com sama-sama menolak narasi ijazah palsu Jokowi, namun melalui strategi pembingkai yang berbeda. CNN Indonesia mengonstruksi realitas melalui bingkai institusional-prosedural yang menonjolkan pemeriksaan forensik, tahapan penyidikan, dan profesionalisme kepolisian, sedangkan Liputan6.com menggunakan bingkai konklusif-afirmatif yang menampilkan pembelaan terhadap Jokowi, penegasan keaslian ijazah, dan penindakan hukum terhadap pihak penuduh. Perbedaan tersebut konsisten teramati pada keempat struktur *framing*, yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retorik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa pada isu delegitimasi personal kepala negara yang berkembang dari disinformasi digital menjadi perkara hukum, perbedaan *framing* antarmedia arus utama Indonesia bekerja pada level strategi wacana, bukan oposisi ideologis; keduanya bermuara pada penyelarasan narasi dengan stabilitas politik dan legitimasi negara. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi media digital agar publik mampu mengenali konstruksi di balik pemberitaan yang tampak objektif.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperlihatkan bahwa model *framing* Pan dan Kosicki, yang selama ini lebih banyak diaplikasikan pada isu elektoral, terbukti efektif untuk membedah mekanisme tekstual pada isu legitimasi kepala negara di media digital; serta menambahkan dimensi analitik "konvergensi diskursif antarmedia" sebagai fenomena yang perlu diintegrasikan dalam pengembangan teori *framing* di konteks media Asia Tenggara.

Secara metodologis, penggunaan kombinasi analisis *framing* Pan dan Kosicki dengan perangkat lunak *HyperResearch* untuk koding sistematis dapat menjadi model prosedural bagi penelitian *framing* kualitatif yang lebih konsisten dan dapat diaudit. Secara praktis, temuan ini relevan bagi jurnalis dan redaksi untuk lebih sadar terhadap pilihan-pilihan *framing* yang mereka buat, bagi regulator media untuk mendorong keberagaman perspektif dalam pemberitaan isu sensitif, serta bagi publik dan pendidik media untuk menjadikan kesadaran *framing* sebagai kompetensi inti literasi media digital. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas korpus berita dan periode analisis, serta menelaah resepsi khalayak terhadap bingkai-bingkai tersebut untuk mengukur efek *framing* secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Aimee, A. P. D. R. (2026). *Framing media online atas isu ijazah presiden Joko Widodo: Kompas, Suara, Tempo*. Universitas Pelita Harapan.

- Aalberg, T., Esser, F., Reinemann, C., Strömbäck, J., & de Vreese, C. H. (Eds.). (2017). *Populist political communication in Europe*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315623016>
- Hameleers, M., & Schmuck, D. (2017). It's us against them: A comparative experiment on the effects of populist messages communicated via social media. *Information, Communication & Society*, 20(9), 1425–1444. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1328523>
- Kim, Y., & Geidner, N. (2021). Framing political conflicts in social media: Comparing news frames and Twitter frames on political issues. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 98(4), 1039–1065. <https://doi.org/10.1177/1077699020985799>
- Waisbord, S. (2022). *Reinventing professionalism: News and journalism in global perspective*. Polity Press.
- de Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. *Information Design Journal + Document Design*, 13(1), 51-62.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.
- Eriyanto. (2012). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Jakarta: Granit.
- Lecheler, S., & de Vreese, C. H. (2019). *News framing effects*. London: Routledge.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory (6th ed.)*. London: SAGE Publications.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. *Political Communication*, 10(1), 55-75.
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of Communication*, 57(1), 9-20.
- Sobur, A. (2015). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism*, 6(2), 137-153.
- Tapsell, R. (2017). *Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution*. London: Rowman & Littlefield International.
- Vliegenthart, R., & van Zoonen, L. (2011). Power to the frame: Bringing sociology back to frame analysis. *European Journal of Communication*, 26(2), 101-115.
- Izzah, S. N., & Fardilla, U. A. (2025). Analisis framing teori Pan dan Kosicki pada 3 media (Tempo.co, Metrotvnews, dan Kompas.com) terhadap berita ijazah palsu Jokowi [Skripsi]. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Muzemmil, M. (2025). Framing pemberitaan media online Detik.com terhadap isu ijazah Joko Widodo. *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam*, 3(2).
- Nur, A. M., Muftadisa, Y., Takbir, Z. Z., Ilham, F., Niam, M. D., & Mamu, M. I. (2025). Kekuatan bahasa dalam memengaruhi persepsi: Analisis semantik dan pragmatik terhadap isu ijazah Jokowi di media digital. *Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)*, 5(3), 348-358.
- Saputra, B. K. (2025). Analisis framing pemberitaan ijazah palsu Jokowi di media digital: Studi kualitatif komparatif Tribunnews.com dan Detik.com. *Jurnal Ilmu Komunikasi Intercode*, 5(2). <https://doi.org/10.36269/ire.v5i2.3891>
- Sofiansyah, D. (2025). Analisis resepsi masyarakat nasional terhadap pemberitaan “Gaduh Ijazah Palsu Jokowi, Fitnah atau Fakta?” (Studi pada media online CNN Indonesia di platform YouTube). *SENAKOM: Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*, 3(1), 1-15.
- Subarkah, A. A., & Arviani, H. (2026). Analisis framing pemberitaan ijazah palsu Jokowi di CNN Indonesia dan Republika (periode April-Mei 2025). *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 12(1).